

Kewajiban negara dalam melakukan otorisasi dan pengawasan terhadap aktivitas peluncuran yang dilakukan oleh Lembaga Non Pemerintah =
State obligation to authorize and supervise the launch activity carried out by Non Governmental Entity / Anugrah Rizky Fadillah

Anugrah Rizky Fadillah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20402933&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan terhadap kewajiban negara dalam Pasal 6 Outer Space Treaty 1967 untuk melakukan otorisasi dan pengawasan terhadap aktivitas peluncuran yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah. Pada tahun 2013, PBB mengeluarkan General Assembly Resolution 68/74 untuk memberikan rekomendasi terhadap legislasi nasional di bidang hukum angkasa, termasuk arahan terhadap otorisasi dan pengawasan yang bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Outer Space Treaty 1967. Beberapa negara telah melakukan legislasi nasional untuk pelaksanaan kewajiban tersebut, termasuk Indonesia. Perbedaan pelaksanaan kewajiban tersebut berbeda di beberapa negara, menjadi pembahasan utama dalam skripsi ini.

ABSTRACT

This thesis discuss the exercise of state obligation on Article 6 of Outer Space Treaty 1967 to authorize and supervise launch activity carried out by non-governmental entity. In 2013, United Nation adopt General Assembly Resolution 68/74 to give recommendation for national legislation on space law, including guidance for which authorize and supervise mean on Article 6 of Outer Space Treaty 1967. Some states are adopt national legislation to exercise that obligation, include Indonesia. The Difference in exercising that obligation being the main discussion on this thesis.